

Ihya Al-Arabiyah; Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab

P-ISSN: 2442-8353 | E- ISSN: 2685-2209

**Hubungan Bunyi, Makna, dan Konteks dalam Wacana Publik:
Kajian Fonetik dan Semantik pada Ucapan Sahroni**

**Muhammad Fakhri Nurfauzan, M. Irwan Jayadi,
Ahmad Dardiri, Wati Susiawati**

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Corresponding E-mail: m.irwanjayadi21@mhs.uinjkt.ac.id

ABSTRACT

This study analyzes the relationship between sound (intonation, stress, speech tempo), word choice, and contextual framing in shaping public interpretation of Ahmad Sahroni's controversial statement "tolol sedunia" within Indonesian political discourse. The research aims to describe how phonetic features and semantic connotations construct perceived meaning and to formulate more constructive communicative alternatives for sensitive public contexts. A descriptive qualitative approach is used through interpretative linguistic analysis supported by contextual triangulation of speaker identity, sociopolitical situation, and public audience reception. The findings indicate that even when delivered with flat intonation, the prominent stress on a pejorative lexical item reinforces an intentional insulting illocution, amplified by the speaker's authority as a public official amid heightened public distrust toward DPR policies. The study concludes that linguistic form and context interact dynamically to escalate negative social impact, and public communication should prioritize neutral diction and controlled prosody to maintain critical substance while reducing potential communicative conflict.

Keywords: *Phonetics, Semantics, Context, Public Discourse, Political Communication*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Pendahuluan

Bahasa merupakan instrumen utama dalam komunikasi manusia, tidak hanya sebagai alat untuk menyampaikan pesan, tetapi juga sebagai medium yang membentuk persepsi, sikap, dan bahkan tindakan sosial. Dalam perspektif ilmu dalalah, bahasa tidak bisa dipisahkan dari unsur bunyi (fonetik), makna (semantik), dan konteks (pragmatik). Tiga aspek ini saling berkaitan erat dan menentukan bagaimana sebuah ujaran dipahami oleh lawan bicara maupun oleh khalayak luas. Kesalahan dalam salah satu aspek tersebut dapat menimbulkan distorsi makna, bahkan memicu konflik komunikasi yang serius. (Ahmad Zaky, 2020)

Bunyi, sebagai aspek fonetik, memiliki fungsi lebih dari sekadar melafalkan kata-kata. Intonasi, tekanan, dan tempo dalam sebuah ujaran dapat memperkuat atau melemahkan makna yang disampaikan. Ucapan dengan intonasi tinggi dapat menimbulkan kesan kemarahan atau penegasan, sementara intonasi datar sering dipersepsi sebagai netral dan tenang. Dengan demikian, pemahaman tentang peran bunyi menjadi krusial, khususnya dalam komunikasi publik di mana setiap ujaran dapat memengaruhi opini masyarakat secara luas. (Najwah Zaid & Putra, 2024)

Di sisi lain, makna (semantik) sangat dipengaruhi oleh diksi atau pilihan kata. Kata yang memiliki makna denotatif netral bisa berubah menjadi ofensif ketika digunakan dalam konteks tertentu atau dilafalkan dengan intonasi tertentu. Sebagai contoh, kata “tolol” dalam makna denotatif berarti “bodoh” atau “tidak cerdas”, namun dalam penggunaan sehari-hari, kata ini sarat dengan konotasi merendahkan, menghina, bahkan menyerang. Menurut Lyons (1977), “semantics is the study of meaning, and meaning itself cannot be divorced from the forms that express it”. Artinya, pemilihan kata yang tidak tepat akan langsung berdampak pada persepsi makna. (Miller & Miller, 1979)

Selain bunyi dan makna, konteks merupakan aspek yang tidak bisa diabaikan. Konteks mencakup siapa pembicara, siapa pendengar, serta situasi sosial, politik, maupun emosional ketika ujaran itu disampaikan. Dalam ilmu pragmatik, konteks berfungsi sebagai bingkai yang menentukan interpretasi suatu pernyataan. Sebuah kalimat yang dianggap wajar dalam percakapan santai bisa menjadi problematis ketika diucapkan di forum resmi atau oleh seorang pejabat negara. Halliday (1985) menyebut bahwa “meaning is always influenced by the context of situation”, sehingga tanpa memahami konteks, sebuah ujaran berpotensi salah tafsir. (Kilpert, 2003)

Dalam komunikasi publik, pemahaman terhadap hubungan bunyi, makna, dan konteks menjadi semakin penting karena pesan yang disampaikan tidak hanya diterima oleh satu individu, melainkan oleh masyarakat yang beragam latar

belakangnya. Seorang pejabat publik, misalnya, harus memiliki kesadaran linguistik yang tinggi karena setiap pernyataannya akan dianalisis, ditafsirkan, bahkan dijadikan dasar untuk mengambil sikap oleh masyarakat. Kesalahan kecil dalam pemilihan kata atau intonasi dapat berdampak besar, termasuk hilangnya kepercayaan publik dan munculnya resistensi sosial. (Mucharam, 2022)

Kasus terbaru yang sempat ramai di media adalah pernyataan Ahmad Sahroni, salah satu anggota DPR RI, yang menuai kritik luas dari masyarakat. Dalam sebuah kesempatan, ia menyebutkan: *“Orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia.”* Ucapan ini kemudian dianggap sebagai bentuk arogansi sekaligus penghinaan terhadap suara publik. Bagi sebagian besar masyarakat, diksi kasar seperti *“tolol”* apalagi ditambah dengan frasa *“sedunia”* menimbulkan kesan merendahkan dan menyepelkan aspirasi rakyat. Pernyataan tersebut bukan hanya dikritik karena isinya, tetapi juga karena cara pengucapan serta konteks politik yang sedang sensitif pada saat itu.

Konteks pembicara dalam hal ini juga sangat menentukan. Sahroni berbicara bukan sebagai individu biasa, melainkan sebagai wakil rakyat yang seharusnya menjaga martabat bahasa dan etika komunikasi. Di samping itu, konteks situasi pada saat pernyataan itu dilontarkan semakin memperburuk keadaan. Masyarakat sedang berada dalam kondisi sensitif akibat berbagai isu yang menimpa DPR, termasuk soal kenaikan tunjangan dan krisis kepercayaan publik. Dalam situasi seperti ini, penggunaan kata yang kasar dan intonasi yang menekan tidak hanya gagal meredakan ketegangan, tetapi justru memperkuat perasaan marah dan ketidakpuasan rakyat. (Bahri, 2016)

Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bahwa komunikasi publik tidak bisa dilepaskan dari hubungan bunyi, makna, dan konteks. Kasus pernyataan Sahroni menjadi ilustrasi bahwa kesalahan kecil dalam aspek linguistik dapat menimbulkan konsekuensi besar di ranah sosial-politik. Melalui kajian fonetik, semantik, dan konteks dalam ilmu dalalah, kita dapat menganalisis secara ilmiah bagaimana sebuah ujaran diproduksi, dipersepsi, dan ditafsirkan, sekaligus merumuskan alternatif diksi dan intonasi yang lebih tepat agar komunikasi publik dapat berjalan dengan konstruktif dan tidak menimbulkan gejolak sosial.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif berbasis analisis wacana linguistik. Metode ini digunakan untuk menelaah

pembentukan makna dalam ujaran publik Ahmad Sahroni melalui tiga dimensi: karakter bunyi (intonasi, penekanan suku kata, dan kecepatan ujaran), pilihan kata, serta faktor konteks yang memengaruhi penerimaan makna oleh publik. Pendekatan deskriptif berfungsi memetakan ciri prosodi pada segmen ujaran yang dinilai kontroversial, sedangkan analisis semantik digunakan untuk menjelaskan pergeseran makna literal ke makna sosial-emosional dari diksi yang digunakan, terutama pada kata berjaringan konotasi negatif.

Studi ini merupakan library-based qualitative inquiry, di mana data utama berupa ujaran Sahroni yang didistribusikan oleh media dan dianalisis sebagai peristiwa bahasa dalam diskursus politik Indonesia. Fokus penelitian tidak diarahkan pada penghakiman personal penutur, tetapi pada mekanisme linguistik yang menyebabkan pesan dimaknai sebagai penghinaan alih-alih kritik substansial.

Data dianalisis secara bertahap, meliputi: (1) mengurai aspek bunyi ujaran, meliputi pola intonasi, tekanan (stress), dan tempo pada bagian kalimat yang dituturkan Sahroni, khususnya kata yang paling menonjol bagi pendengar (2) menelaah makna kata dengan membedakan antara makna dasar/denotatif dan makna tambahan/konotatif, terutama pada diksi kasar yang memunculkan kesan merendahkan atau menyerang ketika disampaikan di ruang publik (3) membaca peran konteks ujaran, mencakup posisi dan otoritas Sahroni sebagai wakil rakyat, suasana politik yang sensitif saat isu DPR sedang disorot, serta penerimaan makna oleh masyarakat luas yang beragam. Keabsahan hasil analisis dikokohkan melalui perbandingan lintas teori fonetik dan semantik, serta validasi berbasis triangulasi sumber gramatika bahasa dan kajian pragmatik-kontekstual. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian interaksi antara prosodi, diksi, dan konteks dalam komunikasi politik di ranah publik.

Hasil dan Pembahasan

A. Ilmu Dalalah dan Hubungan Bunyi–Makna–Konteks

Ilmu dalalah (علم الدلالة) merupakan cabang linguistik yang mempelajari makna bahasa serta hubungan antara tanda linguistik dengan apa yang diacu. Dalam kajiannya, ilmu dalalah tidak hanya membatasi diri pada hubungan kata dan makna leksikalnya, tetapi juga memperhatikan bagaimana bunyi, konteks, dan situasi komunikasi memengaruhi interpretasi makna. (Makhluf & Ridlo, 2025) Dengan demikian, ilmu dalalah menjadi dasar penting untuk memahami bahwa bahasa tidak sekadar kumpulan kata, melainkan sistem tanda yang berfungsi dalam situasi nyata.

Salah satu aspek utama dalam ilmu dalalah adalah hubungan antara bunyi (fonetik/fonologi) dengan makna (semantik). Bunyi bukan sekadar medium netral untuk menyampaikan kata, melainkan bagian dari makna itu sendiri. Intonasi, tekanan, dan ritme ujaran dapat menambah nuansa emosional, mempertegas maksud, bahkan mengubah interpretasi pesan. Misalnya, kata yang sama dapat bermakna berbeda ketika diucapkan dengan nada tinggi yang emosional dibandingkan ketika diucapkan dengan nada rendah dan tenang. (Hasbullah, 2020)

Selain bunyi, makna juga sangat dipengaruhi oleh diksi atau pilihan kata. Ilmu dalalah menyoroti bahwa sebuah kata tidak hanya membawa makna denotatif (makna dasar), tetapi juga makna konotatif (makna tambahan berdasarkan nilai sosial, budaya, atau emosional). Oleh karena itu, pemilihan kata dalam komunikasi publik harus mempertimbangkan dampak konotatifnya, karena sering kali kata yang bernilai ofensif akan menimbulkan tafsir negatif sekalipun maksud awal pembicara tidak demikian. (Hanifah, 2023)

Lebih jauh lagi, ilmu dalalah menekankan pentingnya konteks sebagai faktor penentu makna. Konteks pembicara (siapa yang berbicara), konteks situasi (kapan dan di mana ujaran disampaikan), serta konteks penerima (kepada siapa ujaran ditujukan) akan memengaruhi bagaimana sebuah pernyataan ditafsirkan. Kata yang sama bisa dianggap wajar dalam percakapan santai antar teman, tetapi berubah menjadi problematis jika diucapkan oleh pejabat publik di forum resmi. Inilah yang menunjukkan bahwa dalam ilmu dalalah, makna bersifat dinamis dan selalu terkait dengan bunyi serta konteks penggunaan bahasa. (Sutomo, 2015)

B. Peran Fonetik: Intonasi, Tekanan, Tempo

Fonetik berperan penting dalam menentukan bagaimana sebuah ujaran dipahami oleh pendengar. Intonasi, misalnya, adalah naik-turun nada suara yang digunakan dalam berbicara. Intonasi tidak hanya berfungsi menandai jenis kalimat (pernyataan, pertanyaan, seruan), tetapi juga memberi nuansa emosional pada ujaran. Kalimat yang diucapkan dengan intonasi tinggi sering ditafsirkan sebagai ekspresi kemarahan atau penegasan, sementara intonasi rendah dan datar lebih sering dipahami sebagai ketenangan atau keseriusan. (Uzmi & Nurul, 2024)

Selain intonasi, tekanan (stress) juga berpengaruh pada makna yang dipahami. Tekanan adalah penekanan suara pada suku kata atau kata tertentu dalam sebuah kalimat. Pemilihan kata mana yang ditekan dapat mengubah fokus makna. Misalnya, dalam kalimat "kita harus mendengar rakyat," jika kata "harus" mendapat tekanan, maka maknanya menekankan kewajiban yang mutlak. Namun, jika tekanan diletakkan pada kata "rakyat," maka maknanya beralih untuk menegaskan siapa yang

harus didengar. Tekanan ini sangat menentukan arah penafsiran dan bisa memperkuat atau melemahkan isi pesan.(Setyawan & Taufik, 2019)

Tempo, yakni cepat lambatnya ucapan, juga memiliki peran signifikan dalam komunikasi. Ucapan yang disampaikan dengan tempo cepat sering dipersepsi sebagai bentuk ketegangan, ketidaksabaran, atau dorongan emosi. Sebaliknya, tempo lambat dapat memberi kesan kehati-hatian, ketenangan, atau kesungguhan. Dalam komunikasi publik, penguasaan tempo sangat penting karena mampu memengaruhi bagaimana audiens merespons suatu pernyataan. Dengan demikian, intonasi, tekanan, dan tempo sebagai aspek fonetik saling berpadu dalam membentuk makna dan menentukan efek ujaran terhadap pendengar.

Makna denotatif adalah makna asli, dasar, atau referensial dari suatu kata, yaitu makna yang menunjuk langsung pada objek, peristiwa, atau konsep tertentu sesuai kamus. Tafsir terhadap makna denotatif bersifat objektif karena tidak dipengaruhi oleh perasaan atau penilaian individu. Misalnya, kata "*rumah*" dalam makna denotatif berarti bangunan tempat tinggal manusia (Hanifah, 2023).

Makna konotatif adalah makna tambahan yang melekat pada kata karena asosiasi emosional, budaya, atau konteks tertentu. Tafsir makna konotatif bersifat subjektif, sebab bisa berbeda tergantung penutur, pendengar, atau situasi. Misalnya, kata "*rumah*" dapat berkonotasi pada kehangatan keluarga, kenyamanan, atau bahkan beban tanggung jawab. Pada makna konotatif inilah pembahasan mengenai makna dan konteks menjadi lebih panjang dan kompleks, karena kita perlu memperhatikan siapa yang berbicara, kepada siapa, dalam situasi apa, dan dengan tujuan apa (Hanifah, 2023).

C. Peran Konteks

Identitas pembicara sangat menentukan bagaimana sebuah ujaran dipahami. Faktor seperti status sosial, usia, profesi, atau otoritas pembicara dapat memberi makna tambahan pada kata-kata yang disampaikan. Misalnya, ketika seorang guru mengatakan "*Belajar yang rajin*", ucapan itu memiliki bobot instruksi yang berbeda dibandingkan jika diucapkan oleh seorang teman sebaya, meskipun kata-katanya sama. Hal ini menunjukkan bahwa makna tidak hanya berasal dari bahasa, tetapi juga dari siapa yang menyampaikannya.(Utami & Rizal, 2022)

Pendengar juga berperan besar dalam penafsiran makna. Latar belakang pengalaman, pendidikan, serta hubungan dengan pembicara memengaruhi cara sebuah ujaran dimaknai. Kata "*perubahan*" misalnya, dapat dipahami secara positif oleh pendengar yang menginginkan kemajuan, tetapi bisa pula dipahami secara

negatif oleh pendengar yang merasa nyaman dengan keadaan lama. Dengan demikian, pendengar adalah faktor aktif yang ikut membentuk makna.

Situasi sosial-politik sering kali memberi warna yang kuat pada makna suatu ujaran. Kata atau frasa tertentu bisa netral dalam kondisi biasa, namun sarat makna dalam konteks tertentu. Misalnya, kata “reformasi” di Indonesia pada tahun 1998 tidak sekadar berarti “perubahan”, tetapi merujuk pada gerakan sosial, perubahan rezim, dan tuntutan demokrasi. Konteks sosial-politik inilah yang membuat makna kata menjadi lebih kaya dan kompleks. (Finoza Lamuddin, 2013)

Makna yang sesungguhnya dipahami dalam komunikasi adalah hasil interaksi antara pembicara, pendengar, dan situasi sosial-politik. Tanpa memperhatikan ketiganya, sebuah ujaran berpotensi disalahpahami. Oleh karena itu, dalam kajian linguistik maupun komunikasi, analisis makna harus selalu mempertimbangkan siapa yang berbicara, kepada siapa pesan ditujukan, serta dalam kondisi sosial-politik seperti apa ujaran tersebut muncul. Dengan cara ini, tafsir makna menjadi lebih akurat dan mendalam.

D. Analisis Fonetik Dalam Ucapan Sahroni

Dalam analisis fonetik, salah satu hal paling menonjol dari ucapan Ahmad Sahroni adalah penggunaan kata “tolol” dalam kalimat: “Orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia.” Kata “tolol” diucapkan dengan tekanan yang cukup jelas meski dengan intonasi datar. Tekanan tersebut membuat kata ini tetap terdengar menonjol di antara rangkaian ujarannya. Karena kata itu sendiri sudah bermakna kasar, penekanan sederhana tanpa nada emosional justru memperkuat kesan hinaan. Alih-alih dianggap sekadar penilaian, pilihan diksi tersebut menambah bobot ofensif ujaran terhadap lawan bicara maupun publik yang mendengar. (Jaini, 2025)

Dalam ucapan Sahroni, kata “tolol” tidak diucapkan dengan intonasi tinggi atau nada marah, melainkan dengan intonasi datar dan biasa. Secara fonetik, hal ini menunjukkan bahwa kesan ofensif tidak muncul dari emosi suara, melainkan dari pilihan diksi itu sendiri. Dalam komunikasi publik, penggunaan kata kasar dengan intonasi datar justru dapat menambah bobot penghinaan, karena terdengar seolah ucapan tersebut lahir dari penilaian yang tenang dan sadar, bukan sekadar ledakan emosi sesaat. (Afifah et al., 2024)

Dengan demikian, yang memperburuk persepsi publik bukanlah intonasi meninggi, tetapi kombinasi antara diksi “tolol” dan cara penyampaiannya yang datar. Secara semantik, kata tersebut sudah bermakna hinaan, dan karena diucapkan tanpa nuansa emosional yang eksplisit, publik lebih mudah menafsirkan bahwa hinaan itu

disengaja dan serius. Akibatnya, makna ujaran lebih dipandang sebagai serangan personal daripada kritik argumentatif. (Nur Hidayanti et al., 2025)

Dari sudut pandang ilmu dalalah, hal ini menunjukkan bahwa bunyi merupakan bagian dari makna, bukan sekadar sarana untuk menyampaikan kata. Kata “tolol” yang diucapkan dengan nada tenang mungkin tetap menyinggung, tetapi dampaknya tidak sebesar ketika diucapkan dengan tekanan dan intonasi tinggi. Dengan demikian, aspek fonetik dapat memperbesar atau memperkecil dampak suatu ujaran.

Kasus ini juga membuktikan pentingnya kontrol fonetik dalam komunikasi publik. Tekanan dan intonasi yang salah tempat bisa mengubah maksud menjadi serangan verbal, seperti yang terjadi pada ucapan Sahroni. Karena itu, seorang pejabat harus menguasai intonasi dan penekanan suara agar makna pesannya tetap konstruktif dan tidak memicu reaksi negatif masyarakat.

E. Analisis Semantik dan Diksi dalam Ucapan Sahroni

Dalam kajian semantik, diksi atau pilihan kata menjadi faktor yang sangat menentukan makna yang dipahami pendengar. Kata yang dipilih pembicara bukan hanya membawa arti leksikal, tetapi juga nilai konotatif yang melekat padanya. (Sutomo, 2015) Ucapan Ahmad Sahroni yang menggunakan kata “tolol” menjadi contoh bagaimana sebuah kata dapat memunculkan dampak semantik yang jauh lebih besar daripada makna denotatifnya.

Secara denotatif, kata “tolol” berarti bodoh atau kurang cerdas. Makna ini merujuk pada sifat kognitif seseorang tanpa tambahan nuansa emosional. Namun, dalam penggunaan sehari-hari, kata ini hampir selalu digunakan dalam konteks merendahkan atau menghina. Inilah yang disebut makna konotatif: makna tambahan yang lahir dari pengalaman sosial dan kultural masyarakat. Sehingga, ketika kata ini digunakan di ruang publik, penerima pesan lebih cenderung menangkap sisi ofensifnya daripada makna literalnya. (Arvianti, 2011)

Konotasi negatif yang melekat pada kata “tolol” membuat pesan Sahroni kehilangan sisi argumentatifnya. Alih-alih menimbulkan kesan analitis atau kritis, penggunaan kata tersebut justru membelokkan perhatian pendengar ke arah emosional. Masyarakat lebih sibuk menanggapi kasar tidaknya pilihan kata itu ketimbang mempertimbangkan isi gagasan yang hendak disampaikan. Dengan demikian, aspek semantik di sini menunjukkan bahwa diksi yang salah dapat menggugurkan substansi pesan.

Dalam perspektif ilmu dalalah, fenomena ini dapat dijelaskan melalui hubungan antara tanda bahasa (signifier) dengan makna yang ditimbulkan (signified). Kata “tolol” sebagai tanda bahasa tidak lagi dipahami netral, melainkan sarat dengan nilai

emosional yang dipengaruhi konteks penggunaannya. Ferdinand de Saussure menegaskan bahwa makna bahasa selalu bersifat arbitrer dan relatif terhadap sistem sosial. (Utami & Rizal, 2022) Artinya, makna konotatif dari “tolol” terbentuk karena adanya kesepakatan sosial bahwa kata itu bernilai merendahkan.

Oleh karena itu, semantik dan diksi dalam komunikasi publik harus dipertimbangkan dengan matang. Pemilihan kata yang lebih netral seperti “tidak tepat,” “kurang masuk akal,” atau “tidak bijak” akan lebih menjaga substansi argumen sekaligus menghindari interpretasi ofensif. Dengan begitu, makna yang ingin disampaikan tetap sampai kepada audiens tanpa kehilangan nilai argumentatifnya, dan pada saat yang sama, menjaga etika serta wibawa komunikasi pejabat di ruang publik.

Dalam kajian ilmu dalalah, konteks memegang peranan penting dalam menentukan makna suatu ujaran. Sebuah kata atau kalimat tidak dapat dipahami secara utuh tanpa mempertimbangkan siapa yang mengucapkannya, kepada siapa ia ditujukan, serta dalam situasi apa ujaran itu dilontarkan. Konteks inilah yang membingkai makna, sehingga kata yang sama dapat dipahami secara berbeda dalam kondisi yang berbeda pula. Oleh karena itu, analisis makna tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial, politik, dan emosional yang melatarbelakangi lahirnya suatu pernyataan.

a. Konteks pembicara

Sebagai seorang wakil rakyat, setiap pernyataan Sahroni tidak hanya mencerminkan pendapat pribadi, tetapi juga melekat pada posisinya sebagai pejabat publik. Dalam perspektif pragmatik, status sosial pembicara sangat berpengaruh terhadap makna yang diterima audiens. Kata-kata kasar yang mungkin dianggap wajar dalam percakapan sehari-hari akan dinilai berbeda ketika keluar dari mulut seorang pejabat. Ujaran tersebut tidak hanya dinilai dari isi, tetapi juga dari legitimasi moral dan simbolik yang melekat pada jabatan.

Dalam kasus Sahroni, penggunaan kata “tolol” menjadi lebih bermuatan karena disampaikan oleh seorang wakil rakyat. Publik menafsirkan hal itu sebagai bentuk kelalaian dalam menjaga etika komunikasi politik. Dengan demikian, konteks pembicara memperburuk dampak pernyataan, sebab ia diharapkan menjadi teladan dalam bersikap, bukan justru memicu reaksi emosional. Artinya, jabatan dan identitas sosial pembicara memperkuat dimensi makna yang diterima masyarakat.

b. Konteks situasi

Ucapan kasar Sahroni muncul dalam situasi politik yang sedang memanas, khususnya terkait isu tunjangan DPR yang memicu ketidakpuasan rakyat. Pada saat

itu, masyarakat tengah sensitif terhadap setiap tindakan dan pernyataan pejabat publik. Demonstrasi besar yang terjadi menjadi bukti bahwa publik sudah berada pada titik jenuh terhadap berbagai kebijakan dan perilaku elit politik. Dalam konteks seperti ini, setiap kata yang dilontarkan pejabat memiliki bobot lebih besar, karena langsung dikaitkan dengan kekecewaan kolektif.

Oleh karena itu, penggunaan kata kasar tidak hanya dipahami sebagai ekspresi individu, tetapi juga sebagai simbol ketidakpekaan terhadap penderitaan rakyat. Situasi politik yang penuh ketegangan membuat ujaran Sahroni seolah memperburuk luka sosial yang sudah ada. Hal ini membuktikan bahwa makna sebuah kata dapat meluas, tidak hanya dari aspek fonetik dan semantik, tetapi juga dari konteks situasi yang menyertainya. Dengan demikian, konteks politik yang panas berfungsi sebagai penguat efek negatif dari ujaran tersebut.

c. Konteks penerima

Ucapan Sahroni tidak disampaikan dalam percakapan pribadi yang terbatas, melainkan di ruang publik yang diliput media. Hal ini membuat penerima ujaran bukan hanya lawan bicaranya, tetapi juga masyarakat luas. Dalam komunikasi publik, audiens yang beragam akan menafsirkan makna secara lebih keras karena ujaran itu dianggap mewakili sikap seorang pejabat terhadap rakyat. Dengan demikian, cakupan penerima memperluas dampak, dari sekadar individu menjadi kolektif.

Selain itu, publik sebagai penerima memiliki sensitivitas tinggi terhadap simbol dan bahasa yang digunakan pejabat. Kata kasar yang dilontarkan tidak hanya dipahami sebagai ekspresi emosional, tetapi juga sebagai bentuk pelecehan terhadap martabat rakyat. Respon keras berupa kecaman di media sosial maupun demonstrasi menjadi bukti bahwa tafsir makna dipengaruhi oleh siapa penerimanya. Semakin luas penerimanya, semakin besar pula konsekuensi dari ujaran tersebut.

Kombinasi antara bunyi, diksi, dan konteks menjadikan ujaran Sahroni semakin problematis di mata publik. Meskipun diucapkan dengan intonasi datar, tekanan fonetik pada kata "tolol" tetap membuatnya menonjol dan memperkuat kesan hinaan. Secara semantik, kata tersebut sudah bernuansa kasar, dan dalam konteks pembicara sebagai wakil rakyat, situasi politik yang sensitif, serta penerima yang luas, maknanya semakin diperburuk. Hal ini menunjukkan bahwa makna ujaran tidak pernah berdiri sendiri, melainkan hasil interaksi antara aspek fonetik, pilihan kata, dan konteks komunikasi yang menyertainya. (Arvianti, 2011)

F. Rekomendasi Diksi, Intonasi, dan Konteks Ucapan

a. Diksi dan intonasi alternatif

Penggunaan diksi alternatif seperti “kurang tepat,” “tidak bijak,” atau “kurang realistis” dapat mengurangi efek negatif dalam komunikasi publik. Kata-kata ini tetap menyampaikan kritik, tetapi dengan nuansa yang lebih rasional dan konstruktif. Alih-alih menyinggung atau merendahkan, pilihan kata tersebut memberi ruang bagi lawan bicara maupun publik untuk memahami maksud tanpa merasa diserang secara personal.

Selain pilihan kata, intonasi sangat menentukan bagaimana pesan diterima. Dalam situasi sensitif, nada tenang dan stabil lebih tepat karena menunjukkan kendali diri serta sikap profesional. Dengan intonasi semacam ini, kritik tetap tersampaikan jelas tanpa menimbulkan kesan marah yang bisa memicu reaksi emosional dari pendengar.

Kombinasi diksi netral dengan intonasi tenang membuat pesan lebih fokus pada substansi, bukan pada emosi pembicara. Strategi ini menjaga diskusi tetap berada dalam ranah intelektual sehingga publik dapat menilai isi kritik secara objektif, bukan sekadar menanggapi bahasa yang kasar.

Lebih jauh, penggunaan diksi dan intonasi alternatif juga memperkuat citra positif pembicara. Seorang pejabat yang mampu mengendalikan bahasa dan nada bicarannya akan lebih dihargai, karena penguasaan aspek linguistik bukan hanya persoalan teknis, melainkan strategi komunikasi yang memengaruhi legitimasi dan kredibilitas politiknya.

Strategi konteks menuntut pembicara untuk selalu mempertimbangkan sensitivitas publik sebelum menyampaikan suatu pernyataan. Dalam situasi politik yang panas, masyarakat lebih mudah tersulut oleh kata-kata yang bernada kasar atau merendahkan. Oleh karena itu, ujaran harus disesuaikan dengan kondisi emosional pendengar, agar pesan yang disampaikan tidak justru menambah ketegangan. Selain menyesuaikan bahasa, pembicara juga perlu menunjukkan empati dalam setiap ujaran.

Empati dapat diwujudkan melalui pilihan kata yang lebih halus, nada suara yang menenangkan, serta sikap yang menghargai perasaan publik. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan gagasan, tetapi juga membangun jembatan emosional antara pembicara dan pendengar.

Pada akhirnya, strategi konteks menjadi kunci agar komunikasi publik tetap efektif dan diterima secara positif. Ketika seorang pejabat mampu menempatkan dirinya dalam perspektif masyarakat, maka ujaran yang ia sampaikan akan lebih mudah

dipahami, tidak disalahartikan, dan bahkan dapat meredakan ketegangan sosial. Dengan demikian, empati dan kesadaran konteks harus menjadi landasan utama dalam setiap komunikasi politik.

Simpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa makna sebuah ujaran publik terbentuk melalui keterpaduan bunyi, pilihan kata, dan konteks saat pernyataan disampaikan. Dalam ucapan Sahroni, unsur tekanan pada kata kasar membuat bagian tersebut paling menonjol dan menjadi pusat perhatian pendengar. Dari sisi makna kata, diksi yang secara leksikal bermakna “tidak cerdas” berkembang menjadi makna sosial yang dipahami sebagai ungkapan merendahkan dan menyerang, sehingga pesan lebih dipersepsi sebagai penghinaan dibanding kritik gagasan.

Pada aspek konteks, posisi pembicara sebagai pejabat publik dan situasi wacana yang sensitif membuat interpretasi makna ujaran semakin meluas dan berdampak pada kualitas penerimaan pesan. Kesimpulannya, ujaran publik yang menggunakan diksi kasar dan penekanan prosodik pada kata bermuatan negatif berpotensi menggeser fungsi bahasa dari kritik menjadi serangan makna di ruang publik. Penelitian lanjutan dapat diarahkan pada kajian strategi fonetik dalam komunikasi politik, model kesantunan diksi pejabat publik, atau analisis ujaran figur lain dalam konteks sosial yang sensitif.

Referensi

- Afifah, M., Ningrum, A. S. B., Wahyuni, S., & Syaifulloh, B. (2024). Self-Efficacy, Anxiety, and Emotional Intelligence: Do They Contribute to Speaking Performance? *Journal of Languages and Language Teaching*, 12 (2), 793. <https://doi.org/10.33394/jollt.v12i2.10798>
- Ahmad Zaky. (2020). Perkembangan Dalalah. *WARAQAT : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2(1), 24. <https://doi.org/10.51590/waraqat.v2i1.48>
- Arvianti, I. (2011). Kajian konteks dalam tindakan tutur tidak langsung. *Majalah Ilmiah Informatika*, 2(1), 68–81. <https://www.unaki.ac.id/ejournal/index.php/majalah-ilmiah-informatika/article/view/32>
- Bahri, S. (2016). Peran Al-Siyāq (Konteks) Dalam Menentukan Makna. *Ittihad*, 14 (26), 86–98. <https://doi.org/10.18592/ittihad.v14i26.875>

- Finoza Lamuddin. (2013). PEMAKAIAN KATA REFORMASI DALAM MEDIA MASSA JAWA POS. *Komposisi Bahasa Indonesia Untuk Mahasiswa Non Jurusan Bahasa*, 18(35), 21–24.
- Hanifah, D. U. (2023). Pentingnya Memahami Makna, Jenis-jenis makna dan Perubahannya. *Jurnal Ihtimam*, 6(1), 157–171. <https://doi.org/10.36668/jih.v6i1.483>
- Hasbullah, M. (2020). Hubungan Bahasa, Semiotika dan Pikiran dalam berkomunikasi. *Al-Irfan: Journal of Arabic Literature and Islamic Studies*, 3(1), 106–124. <https://doi.org/10.36835/al-irfan.v3i1.3712>
- Jaini, M. S. (2025). Public Speaking: Teknik Berbicara di Depan Umum dalam Mengelola Vokal dan Gesture yang Tepat. *Saniskala; Jurnal; Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 25–34. <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/saniskala>
- Kilpert, D. (2003). Getting the full picture: A reflection on the work of M.A.K. Halliday. *Language Sciences*, 25(2), 159–209. [https://doi.org/10.1016/S0388-0001\(01\)00022-5](https://doi.org/10.1016/S0388-0001(01)00022-5)
- Makhluf, H. M., & Ridlo, U. (2025). *Ilmu Nahwu dan Dalalah Bahasa Arab di Zaman Klasik*. 1(2), 158–164.
- Miller, G. A., & Miller, K. (1979). John Lyons on Semantics. *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 31(4), 711–735. <https://doi.org/10.1080/14640747908400760>
- Mucharam, A. (2022). Membangun Komunikasi Publik Yang Efektif. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 27(1), 71–82.
- Najwah Zaid, L., & Putra, M. (2024). Dasar – Dasar Fonetik Dalam Pembelajaran Bahasa. *Jurnal Sathar*, 2(2), 78–91. <https://doi.org/10.59548/js.v2i2.284>
- Nur Hidayanti, E., Novita Harianja, C., Sari, R., Balqis, R., & Hana Pebriana, P. (2025). Semantic Issues and Their Resolution in Linguistic Studies. *The Future of Education Journal*, 4(6), 1847–1853. <https://journal.tofedu.or.id/index.php/journal/index>
- Setyawan, C. E., & Taufik, A. (2019). Berbahasa, Berfikir Dan Proses Mental Dalam Kajian Psikolinguistik. *Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Dan Kebahasaaraban*, 108.
- Sutomo, J. (2015). Konteks, Referensi, dan Makna: Kajian Semantik. *Jurnal Pengembangan Ilmu Bahasa Dan Budaya*, 10(2), 26–34. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fbib1/article/view/3748>
- Utami, R., & Rizal, M. (2022). Bahasa Dalam Konteks Sosial (Peristiwa Tutur Dan

Tindak Tutur). *JUMPER: Journal of Educational Multidisciplinary Research*, 1(1), 16–25. <https://doi.org/10.56921/jumper.v1i1.36>

Uzmi, M. F., & Nurul, A. (2024). Hakikat Fonologi Dalam Kajian Linguistik. *Jurnal Sathar*, 2(2), 55–66. <https://doi.org/10.59548/js.v2i2.282>